

SABTU, 30 APRIL 1994

Halaman 4

Keluarga dan Negara

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Oleh Ariel Heryanto

SECARA aklamasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional (TKI). Keputusan ini layak disambut lebih serius dari sekadar basa-basi seremonial. Keluarga menuntut kajian kritis kita bersama.

Keputusan PBB itu diberi semboyan: "membangun demokrasi terkecil di jantung masyarakat". Di satu pihak diakui semakin berat dan rumitnya beban hidup umat manusia massa ini di berbagai bidang. Di pihak lain diakui pula betapa terbatasnya kemampuan aneka lembaga sosial yang besar, megalah dan bergengsi (termasuk PBB) untuk mengatasi berbagai derita itu.

Penghargaan dan harapan

TKI menitipkan sebuah penghargaan dan harapan. Lembaga keluarga dianggap telah paling berjasa, tangguh dan giat memberikan perlindungan, kekuatan moral dan material bagi sebagian besar umat manusia dalam pergulatan hidup nyata sehari-hari. Berbeda dari aneka lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang banyak berpidato, sibuk membuat rekayasa, tak segan menggunakan kekerasan, dan menghabiskan dana dari pihak lain.

Keputusan PBB itu merupakan penghargaan resmi sebuah lembaga agung kepada lembaga sosial terkecil, lokal, sehari-hari, dan bersahaja. Ini bukan hal baru, tetapi senantiasa diperbarui dalam berbagai versi. Dalam suasana meriahnya postmodernisme, hal ini sama sekali tidak aneh. TKI juga menyatakan sebuah harapan bahwa demokrasi dapat dibangun dari lingkup sosial yang terkecil, lokal, sehari-hari, dan bersahaja, yakni keluarga.

Demokrasi sehari-hari

Analisis sosiologis oleh Ha-Gen Koo atas demokratisasi di Korea Selatan memberikan ilustrasi bagus. Gerakan demokratisasi di negeri itu bisa ku-kuk berkat bertemunya aneka arus perjuangan rakyat. Ada gerakan buruh yang menekankan perjuangan "demokrasi ekonomi". Mereka bersekutu dengan kelas menengah yang menekankan "demokrasi polisi pria". Tidak aneh banyak pe-

tik" (pemilu yang bersih, kebebasan berpendapat, HAM). Ada lagi yang memperjuangkan "demokrasi sosial" dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.

Biarpun menggebu dengan gegap-gempita, demokratisasi tidak dapat diperjuangkan secara sempit di tingkat lembaga negara: pemilu, sidang DPR, atau ruang peradilan. Atau melulu lewat seminar, demonstrasi, pemogokan, bahkan revolusi. Demokratisasi perlu diterjemahkan dalam kehidupan yang bersahaja dan sehari-hari. Di tingkat kampung, di pusat belanja (antara pengunjung, penjaga dan pemilik toko), di jalanan (pejalan, becak dan mobil). Juga di lingkungan "swasta": di lembaga penerbitan (wartawan, redaksi, pemodal), pendidikan (mahasiswa, dosen dan rektor), keagamaan (umat pemeluk dan petinggi agama), dan keluarga!

Demokratisasi sosial yang bergulir dalam berbagai bidang akan sulit ditindas oleh penyuaga. Kebal terhadap hasutan primordial, tuduhan adanya GPK, buruh yang brutal, atau oknum LSM sebagai dalang subversi. Itu sebabnya kita perlu lebih menghargai hubungan sosial yang kelihatannya kecil, lokal, pribadi atau sepele. Misalnya hubungan romantik antarpacar. Atau suami-istri dalam keluarga. Atau sesama wartawan, advokat, dan antar-aktivis demonstran. Atau protes dalam pemilihan rektor di sebuah kampus yang kelihatannya bersifat "interen".

Keluarga: awal dan ajalnya

Berbagai peristiwa nyata yang kecil dan sehari-hari menyadarkan kita betapa majemuk dan kompleksnya hubungan sosial yang membentuk kekeluargaan. Betapa banyak ragam keluarga yang terbaik dalam percakapan yang lazim tentang keluarga. Keluarga bukanlah lembaga yang serba manis seperti gambaran romantis dalam uraian di atas. Atau di komik dan film cerita. Sejak awal terbentuknya lembaga keluarga berkait erat dengan sejarah penindasan kaum perempuan di bawah kekerasan, kuasa, harta dan gengsi pria. Tidak aneh banyak pe-

nguasa otoriter (biasanya pria) di Eropa dan bekas jajahan Eropa yang mengagungkan "asas kekeluargaan" dalam se-pa-terjang politiknya. Pemujian terhadap "asas kekeluargaan" juga sering menyulut rasisme.

Tak kurang dari Hendryk Sosalski, koordinator PBB untuk peringatan TKI, yang menyadari kemajemukan maupun sisi hitam pada lembaga keluarga. Keluarga bukan lembaga sosial yang abadi dan universal. Untuk lingkup terbatas, misalnya masyarakat Indonesia mutakhir, betapa majemuk dan rumit aneka keluarga yang ada.

Bila sebagian besar dari kita mempunyai pemahaman spontan yang seragam ketika mendengar kata "keluarga", pasti ada yang tak beres. Tetapi tidak aneh. Kita adalah korban penataran seumur-hidup tentang makna keluarga secara tunggal lewat iklan dalam film. Kedua-nya bertubi-tubi membentuk batin dan fantasi kita dengan gambaran ideal tentang keluarga secara baku: satu ayah, satu ibu, dua anak dari kelas menengah di kota.

Keluarga merupakan konstruksi sosial. Betapa pun panjang usianya, lembaga sosial ini punya masa awal kebangkitannya, masa kejayaan, dan keruntuhannya. Ia dibentuk dan diawetkan untuk memenuhi kebutuhan zamannya. Mirip totem, tombak, tandu atau becak. Ada yang dipuji dan dikenakatan seawktu berjaya. Tapi menjadi usang dan dianggap mengganggu ketika zaman berubah.

Sejarah bangkit dan runtuhnya lembaga keluarga ini telah dikaji para ahli secara rumit. Tapi beberapa pokoknya dapat disederhanakan. Ia dikaitkan dengan terbentuknya hak milik pribadi, dominasi pria, dan negara. Bukan karena majunya peradaban atau ketatnya moralitas. Malah sebaliknya, moralitas seksual, aneka tabu, tahtayul, dan adat kekeluargaan dibuat riut dan ketat ketika ada (bagian) masyarakat yang mengandalkan keluarga sebagai basis organisasi ekonomi dan politik. Misalnya di kalangan bangsawan, tuan tanah, dan hartawan pada awal kapitalisme di Eropa.

Runtuhnya lembaga keluarga

tidak disebabkan merosotnya akhlak atau moral masyarakat. Para sarjana mengaitkannya dengan perubahan sosial. Pertama, semakin mudah, murah, dan manjurnya teknologi kontrasepsi. Kedua, meningkatnya posisi ekonomi kaum perempuan. Ketiga, semakin rumitnya perkembangan kapitalisme. Banyak organisasi sosial di luar keluarga lebih mampu melindungi mereka yang berharta, berkuasa, dan berwibawa. Keturunan dan kekerabatan kehilangan fungsi politik dan ekonomi secara drastis.

Dulu orang dewasa dianggap normal bila menjalani empat hal ini dalam satu paket utuh: pernikahan, hubungan seksual, punya keturunan, dan berkeluarga. Urutannya pun tetap. Kini orang bisa memilih salah satu atau dua tanpa yang lain. Misalnya menikah dan hubungan seksual tanpa melahirkan anak. Menikah dan punya anak, tanpa hubungan seksual. Atau berhubungan seksual dan punya anak tanpa menikah. Urutannya pun boleh dibolak-balik.

Runtuhnya posisi tradisional keluarga tidak terjadi secara seragam, tidak secara universal berevolusi linier. Tidak merata atau dalam irama yang cepat di berbagai negara, atau bagian dari sebuah negara. Di sejumlah negara industrial percereraan tidak lagi memalukan atau menyedihkan. Justru sebaliknya.

Bagaimana di Indonesia kini?

Indonesia sedang ngotot mengindustrialkan diri. Adakah kecenderungan ke arah rontoknya lembaga keluarga juga? Adakah pilihan untuk menghindar dari kecenderungan itu?

Angka percereraan di negeri ini meningkat secara mantap. Minat untuk menikah terus merosot. Tapi tidak dapat disangkal keluarga masih menjadi pranata sosial yang dominan di Indonesia. Keluarga masih sering diperalat sebagai model atau simbol organisasi sosial yang ideal. Banyak birokrat (biasanya pria) minta dihormati sebagai "bapak" dalam organisasi modern. Walau dominan, pandangan demikian tidak lagi hegemonis. Telah muncul perlawanan dari budaya tanding. Ketegangan melanda masyarakat kita. Juga di kalangan intelektualinya. Perlu contoh?

Dalam sebuah tulisan yang bagus di *Kompas*(21/4/94), Wardah Hafidz mengritik artikel Th. Sumartana (*Kompas*, 25/3/94) tentang keluarga. Sumartana mereproduksikan pan-

dangan dominan tentang keluarga yang oleh Wardah dijuluki "myopia" kelas, etnis dan geografis. Uraian Wardah berpusat pada masalah gerakan perempuan. Bukan keluarga. Di bawah ini diajukan kajian kritis lebih lanjut tentang keluarga yang diajukan Sumartana.

Perlu dihargai bahwa tulisan Sumartana itu sendiri bernada kritis, bukan konformatif, terhadap pranata keluarga di Indonesia. Khususnya terhadap kekuasaan para bapak. Tapi dua masalah fundamental dapat digugat dari uraian Sumartana. Pertama, ia menulis kritis dengan asumsi dasar yang konservatif "bahwa keluarga merupakan basis paling dasar untuk upaya untuk membangun manusia dan masyarakat". Seakan-akan eksistensi dan sejarah manusia diciptakan oleh keluarga. Padahal sebaliknya. Seakan-akan esensi dan eksistensi manusia sama terus di sepanjang sejarah.

Kedua, ia membayangkan keluarga sebagai wilayah kehidupan manusia yang pribadi atau otonom. Mirip gambaran romantik tentang individu dalam ideologi borjuis. Yakni sesuatu yang lugu, murni dan alamiah. Sesuatu yang berada di luar (dan terancam oleh) "masyarakat" yang kotor dan sakit. Simak yang ditulis Sumartana: "Ketika para bapak dan para ibu tidak mengetahui kemana pergiannya anak-anak mereka, tahu-tahu mereka telah hilang ditelan dan telantar di perut masyarakat dengan se-gala isinya."

Padahal, tanpa terkecuali lembaga keluarga (termasuk kamar tidur "para bapak dan para ibu") selalu berada "di perut masyarakat dengan se-gala isinya". Perut masyarakat yang hidup senantisa bekerja mencerna isinya tanpa ampun. Mengeluarkan yang sudah jadi ampas, dan menyambut makanan baru. Itulah sejarah.

Hari ini keluarga dapat dijadikan arena perjuangan demokratisasi sosial. Seperti yang diharapkan Sumartana. Tapi esok atau lusa, keluarga akan menjadi salah satu sasaran bulan-bulan dari proses demokratisasi itu sendiri. Seperti yang dicemaskan Sumartana dan banyak orang lain yang takut pada feminism. Manusia senantisa membentuk dan dibentuk jati dirinya secara baru. Perubahan itu bukan kiamat, tapi sejarah. ***

* Ariel Heryanto, Staf Pengajar Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana.